



Article Informations
Corresponding Email:
dmstris543@gmail.com

Received: 11/02/2025; Accepted:
22/02/2025; Published: 30/06/2025

PERAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KENYA 2020-2024

Dimas Tri Sugiarto¹⁾, Iing Nurdin²⁾, Jusmalia Oktaviani³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Mengadopsi melalui masa lalu yang kelam, penelitian ini meneliti agensi wanita yang bertahan hidup ditengah hilangnya hak-hak fundamental mereka sebagai manusia. Hal ini tentunya mengeksplorasi efek dari berbagai peran organisasi internasional yaitu UN Women terkait kasus kekerasan berbasis gender hingga spektrum yang lebih parah lagi yaitu pembunuhan terhadap perempuan atau Femisida di Kenya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan melibatkan pengumpulan data serta analisis terkait dokumen dan laporan resmi dari organisasi internasional khususnya UN Women, yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Kejahatan berbasis gender hingga berakhir pada hilangnya nyawa perempuan diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan gender yang paling ekstrem karena ketidaksetaraan gender, superioritas, dominasi, hingga misogini. Kenya menjadi negara absolut yang mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan hingga femisida tertinggi berdasarkan laporan dari UN Women. UN women menjalankan perannya sesuai dengan pendekatan Liberalisme Institusional, yang dimana dalam konteks Kenya, Kenya sudah tidak bisa menjadi aktor tunggal dalam penanganan kasus, melainkan membutuhkan kerja sama dengan UN Women sebagai aktor non-negara dengan mandat pemberdayaan perempuan. UN Women juga menjalankan perannya sesuai dengan teori Kelly-Kate S. Pease, yang mencakup peran sebagai *Collective act mechanism*, *problem solving*, *capacity building* dan *aid provider*

Kata Kunci: UN Women, Kekerasan Berbasis Gender, Femisida

Abstract

Adopting a dark past, this research examines the agency of women who survive the loss of their fundamental human rights. It explores the effects of the various roles of the international organization UN Women in relation to cases of gender-based violence to the more severe spectrum of femicide in Kenya. This research uses a qualitative method approach involving data collection and analysis related to official documents and reports from international organizations, especially UN Women, which focuses on handling cases of gender-based violence. Gender-based crimes that end in the loss of women's lives are identified as the most extreme form of gender violence due to gender inequality, superiority, domination, and misogyny. Kenya is the absolute country that records the highest cases of violence against women to femicide based on a report from UN Women. UN women carries out its role in accordance with the Institutional Liberalism approach, which in the Kenyan context, Kenya cannot be a single actor in handling cases, but requires cooperation with UN Women as a non-state actor with a mandate to empower women. UN Women also carries out its role in accordance with Kelly-Kate S. Pease's theory, which includes the roles of collective action mechanism, problem solving, capacity building and aid provider.

Keywords: *UN Women, Gender Based Violence, Femicide*

PENDAHULUAN

Studi Hubungan Internasional merupakan studi yang sangat kompleks, dimana studi ini tidak hanya terfokus pada satu fenomena saja, tetapi juga terhubung dengan banyak fenomena yang ada di dunia. Hubungan internasional memiliki dua jenis perspektif yaitu tradisional dan perspektif alternatif. Yang dimana perspektif ini membantu mengkaji tentang isu atau fenomena yang ada, salah satu isu yang menarik perhatian penstudi hubungan internasional adalah terkait isu gender.¹ Salah satu permasalahan global yang erat hubungannya dengan diskriminasi gender dan pelanggaran hak asasi manusia adalah kekerasan terhadap perempuan. UN Women menyatakan satu dari tiga perempuan atau setara dengan 30% perempuan di dunia selalu mendapatkan tindakan yang mengancam fisik dan seksual setidaknya sekali sepanjang hidupnya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak kebebasan fundamental

¹ Jackson, Robert, dan Georg Sørensen. Introduction to International Relations. Oxford: Oxford University Press, 1999.

perempuan yang akan merusak dan membatasi kenikmatan serta kebebasan atas hak-hak yang seharusnya diperoleh.²

Kekerasan terhadap perempuan ini menjadi suatu bentuk adanya dominasi dari kekuasaan yang tidak setara secara historis antara laki-laki dan perempuan. Hak-hak dan prinsip sudah tercantum dalam instrument internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, jika dilaksanakan secara efektif maka penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan akan memberikan kontribusi pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan.³ Suatu perkembangan yang paling penting bagi perempuan adalah adopsi CEDAW dalam hukum internasional, meskipun sudah tersedia berbagai instrumen lain yang mengikat perempuan, namun pada kenyataannya masih banyak sekali perempuan-perempuan dunia belum bisa menikmati hak yang setara dengan laki-laki.⁴

Perjanjian CEDAW ini menjadi sebuah alat yang membantu perempuan di seluruh dunia untuk menciptakan perubahan dalam melawan kekerasan diskriminasi serta kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan. CEDAW sendiri merupakan badan independen yang memantau penerapan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di tahun 1979 PBB mengadopsi CEDAW sebagai perjanjian hak asasi manusia terpenting bagi perempuan.⁵ Dalam hal ini Kenya merupakan salah satu negara anggota yang telah menandatangani konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sejak tahun 1984. Yang dimana para pihak pada konvensi tersebut harus bisa meminimalisir diskriminasi

² UN Women. Ending Violence Against Women and Girls: How We Make a Difference. 2013. URL: https://unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%20Women%20EVAW-ThemBrief_US-web-Rev9%20pdf.pdf.

³ Tchoukou, J. "The Silences of International Human Rights Law: The Need for a UN Treaty on Violence Against Women." *Human Rights Law Review* 23, no. 3 (2023).

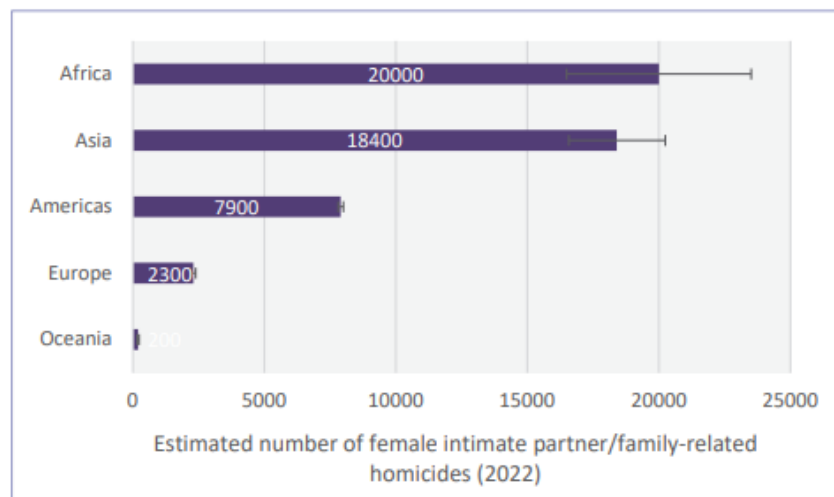
⁴ Deane, T. "Gender-Based Violence in International Human Rights Law—The Efficacy of the United Nations Human Rights Legal Framework and CEDAW in Addressing the Issue." *The Age of Human Rights Journal* 23 (2024): e8662-e8662.

⁵ United Nations (UN). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 1979. Diakses dari <https://www.ohchr.org/sites/default/files/cedaw.pdf>

terhadap perempuan dengan mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konstitusi nasional mereka, dan juga turut menetapkan perlindungan hukum bagi hak perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten.

Meskipun Kenya merupakan negara penandatangan perjanjian internasional dan juga memasukan langkah perlindungan ke dalam undang-undangnya, namun sistem peradilan Kenya memiliki pergerakan yang sangat lambat dalam bertindak untuk mencegah atau mengadili kasus kekerasan terhadap perempuan. Rata-rata dibutuhkan 1.900 hari sejak pelaku ditangkap agar pelaku benar-benar diberi hukuman, dan yang lebih parah lagi tidak sedikit juga petugas penegak hukum sendirilah yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan di Kenya. hal ini lah yang menimbulkan impunitas dan ketidakpercayaan masyarakat Kenya terhadap negara.⁶

Gambar 1. 1 Estimates based on UNODC Homicide Dataset



Sumber : Women across Kenya hold march against femicide (2024)

Studi yang dilakukan UN Women dalam diagram diatas menunjukkan bahwa Afrika mencatat jumlah absolut paling tinggi dengan kasus

⁶ Fordham International Law Journal. "Kenya's Femicide and Gender-Based Violence Crisis: A Case Study for an International Response to the Femicide Epidemic." Fordham International Law Journal (2024). Diakses dari <https://www.fordhamilj.org/iljonline/kenyas-femicide-and-gender-basedviolence-crisis-a-case-study-for-an-international-response-to-the-femicide-epidemic>

pembunuhan terhadap pasangan intim perempuan dan keluarga dengan angka perkiraan 20.000 korban jiwa, diikuti juga oleh Asia dengan angka 18.400, kemudian 7.900 di Amerika, 2.300 di Eropa dan yang terakhir 200 di Osenia. Selama kasus pembunuhan ini berlangsung, Kenya memiliki mekanisme hukum internasional dan juga nasional untuk memerangi kejahatan di Kenya. Salah satunya ialah Konstitusi Kenya 2010 yang memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak perempuan dilindungi berdasarkan pasal 27, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur hukuman kekerasan terhadap perempuan dan juga anak perempuan. Meskipun terdapat hukum atau konstitusi di Kenya pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan juga pembunuhan terhadap perempuan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.⁷

Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan menjadi kasus yang selalu terjadi dan menjadi fokus utama dunia bahkan hingga saat ini, salah satunya adalah Kenya, yang sedang ditimpa kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan atau bisa disebut dengan femisida. Menurut Russell, femisida adalah pembunuhan perempuan oleh laki-laki karena mereka perempuan.⁸ Menurut laporan dari Human Rights Watch yang memuat terkait kekerasan terhadap perempuan selama Covid-19 di Kenya, melaporkan kegagalan Kenya dalam memerangi kasus berbasis gender yang memicu semakin tingginya peningkatan kekerasan seksual termasuk juga anak-anak perempuan selama pandemi Covid-19.⁹

Dilansir dari PBB 2020 kekerasan fisik meningkat dari 33% menjadi 43,3%, sementara kekerasan seksual meningkat dua kali lipat dari 2,5% menjadi 5% yang berarti terdapat peningkatan kasus kekerasan berbasis gender sekitar 3.650 yang dilaporkan antara Maret dan akhir Juli 2020.

⁷ Nation Africa. "16 Dead in One Month: Women Across Kenya Hold March Against Femicide." Nation Africa, 2024. Diakses dari <https://nation.africa/kenya/news/16-dead-in-one-month-womenacross-kenya-hold-march-against-femicide-4504596>

⁸ Russell, D. E. "My Years Campaigning for the Term 'Femicide'." *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence* 6, no. 5 (2021): 6.

⁹ Human Rights Watch. "Kenya: Survivors of Gender-Based Violence Lack Help." 2021. Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2021/09/21/kenya-survivors-gender-based-violence-lack-help>

Namun sayangnya pada masa awal Pandemi Covid-19 dan ketika melonjaknya kasus kekerasan berbasis gender di Kenya, KBG tidak lagi menjadi perhatian serius dan dianggap penting.¹⁰ Aktivis di Kenya mengatakan bahwa negara mereka mengalami peningkatan angka yang tinggi dalam kasus femisida. Mereka mendefinisikan bahwa femisida ini salah satu aksi kejahatan yang dilakukan secara sengaja oleh laki-laki terhadap perempuan atau bahkan anak-anak perempuan berdasarkan jenis kelamin mereka.

Femicide Out Kenya, memantau aksi kejahatan tersebut hingga memcatat 58 angka kematian terhadap perempuan periode Januari dan Oktober di tahun 2022. Hingga di tahun 2023 mereka mencatat sedikitnya 152 pembunuhan mencapai jumlah tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, menurut perkiraan platform investigasi Africa Uncensored dan Africa Data Hub. Kasus kekerasan terhadap perempuan sangat seringkali terjadi di Kenya, hingga banyak media melaporkan perempuan yang dipukuli, ditikam, dan diperkosa di Kenya. Survey nasional tahun 2022 juga menemukan bahwa perkiraan sepertiga perempuan di Kenya mencapai 9 juta pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik. Sejatinya Kenya sendiri sudah turut serta mengadopsi perjanjian yang fokus pada kekerasan berbasis gender, termasuk pada Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan CEDAW, bukan hanya itu undang-undang nasional seperti Undang-Undang pelanggaran seksual juga mengkriminalisasi kekerasan terhadap perempuan, bahkan polisi Kenya pun memiliki bagian ruang terkhusus gender. Namun para aktivis Kenya menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Kenya masih kurang efektif dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan.¹¹

Femisida bukanlah suatu konsep baru, dilansir dari Canadian Femicide Observatory untuk keadilan dan pertanggungjawaban, penggunaan

¹⁰ UN OCHA. "Kenya Situation Report – September 2020." Diakses dari <https://reports.unocha.org/en/country/kenya/>

¹¹ Al Jazeera. "Femicide in Kenya: What's Causing an Epidemic of Violence Against Women?" 2024. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2024/1/27/femicide-in-kenya-whats-causing-the-frequent-murders-of-women>

femisida ini pertama kali didokumentasikan di tahun 1801 dalam sebuah buku berjudul *A Sastirical View Of London At The Commencement Of The Nineteenth Century*. Femisida digunakan untuk merujuk pada pembunuhan terhadap kaum perempuan. Pada saat itu beberapa sarjana dan aktivis hak asasi manusia telah mendefinisikan istilah femisida secara beragam dengan konteks yang sama, Jill Radford dan juga Diana Russell yang mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan misogini perempuan oleh laki-laki. 1998 Jacquelyn Camphabel dan Carol Runyan mendefinisikan ulang bahwa kegiatan aktivitas femisida ini merupakan kasus pembunuhan perempuan, tanpa memandang motif atau status pelaku, bahkan organisasi internasional yang berfokus pada kesehatan yaitu WHO mendefinisikan istilah femisida ini sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan karena mereka perempuan.¹²

Data dari KNHCR (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya), sekitar 45% perempuan khususnya di Kenya, mereka pernah mengalami berbagai kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka. Bahkan KDHS atau (Survei Demografi dan Kesehatan Kenya) 2023, mengungkapkan bahwa 44% perempuan yang berusia 15 sampai dengan 49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik, 13% kekerasan seksual. Menurut UN Women delapan tahun terakhir 75% korban pembunuhan perempuan di Kenya dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga. Angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan diambil dari jutaan pengalaman perempuan dan juga anak-anak perempuan yang mendapatkan kasus kekerasan terhadap perempuan serta korban dari pembunuhan terhadap perempuan, yang seharusnya mereka aman dan terlindungi.¹³ Kasus femisida atau pembunuhan terhadap perempuan tersebut memiliki pola yang berulang, dengan mengindikasikan permasalahan yang sistemik dan lebih parah. Menurut laporan dari kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan serta juga UN Women, pasangan intim sampai saat ini menjadi pelaku bahkan korban

¹² Russell, D. E., & Harmes, R. A., eds. *Femicide in Global Perspective*. New York: Teachers College Press, 2001.

¹³ World Vision. "Kenya's Statement on Gender-Based Violence (GBV)." 2024. Diakses dari <https://biznakenya.com/gender-based-violence/>

femisida yang mencapai rata-rata hingga 55%. Realitas yang lebih parah lagi bahwa sedikitnya 10% perempuan terbunuh pada awal bulan ditahun 2024.

Dalam usaha melindungi hak-hak perempuan dari adanya berbagai kasus diskriminasi gender di berbagai dunia, peran organisasi internasional United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (UN Women) dibutuhkan peranan penting dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya. UN Women merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan menciptakan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dengan fokus pada penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan demi mewujudkan goals SDG yang harus tercapai pada tahun 2030. UN Women turut memimpin beberapa inisiatif yang bertujuan mencegah femisida di Kenya, salah satunya ialah dengan memberikan pelatihan khusus bagi polisi dalam program berbasis gender, serta juga polisi Kenya turut dilatih dan mengenali tanda-tanda femisida yang dihadapi oleh perempuan.¹⁴

PEMBAHASAN

1). Kekerasan Terhadap Perempuan Hingga Spektrum Femisida Di Kenya.

Ketidaksetaraan gender atau kesenjangan gender berawal dari adanya budaya patriarki yang selama ini dijalankan oleh masyarakat. Carole Pateman menegaskan bahwa negara-negara Eropa telah menjalankan budaya patriarki absolut yang dianggap sebagai bentuk penyeimbangan peran dan menyebut fenomena ini sebagai kontrak seksual.¹⁵ Dalam konteks Kenya, Kenya memiliki tantangan yang cukup besar dengan patriarki yang telah berakar kuat dalam masyarakat. Struktur patriarki ini menciptakan adanya kesenjangan antara laki-laki dan juga perempuan di berbagai bidang aspek kehidupan. Meskipun upaya untuk mencapai kesetaraan gender

¹⁴ UN Women. "Femicide Cases in Kenya Fuel Urgent Calls for Action to End Violence Against Women." 2024. Diakses dari <https://www.unwomen.org/en/news-stories/featurestory/2024/02/femicide-cases-in-kenya-fuel-urgent-calls-for-action-to-end-violence-againstwomen>

¹⁵ Pateman, "Contracting In" <https://content.e-bookshelf.de/media/reading/L-2345384-6ea76054f2.pdf>

sudah ada, baik dari sisi pemerintahan Kenya maupun organisasi non pemerintah, tantangan tersebut masih bertahan dan seringkali menyulitkan implementasi kebijakan yang inklusif. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya norma-norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior atau menempatkan perempuan pada kelas kedua. Sebagai contoh, di beberapa wilayah pendidikan perempuan masih kurang dianggap penting, sehingga angka putus sekolah dikalangan anak perempuan terbilang tinggi. Selain itu, kekerasan berbasis gender tetap menjadi permasalahan serius yang menciptakan lingkungan yang membatasi kebebasan dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Meskipun perempuan Kenya memiliki kontribusi yang nyata dalam pembangunan negara, mereka sejatinya belum diperlakukan sebagai mitra yang setara dengan laki-laki. Kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender tetap menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi di Kenya. Sayangnya, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, sehingga akses perempuan terhadap keadilan menjadi terbatas, yang sangat memprihatinkan. Pandemi Covid-19 pun turut memperparah kondisi ini, meningkatkan resiko kekerasan dan ketidaksetaraan yang dialami perempuan.¹⁶ Covid-19 merupakan salah satu pandemi terbesar yang melanda dunia akhir-akhir ini. Dilihat dari skala global, pandemi telah mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs karena pemerintah di seluruh dunia telah berfokus pada penerapan langkah-langkah penanggulangan. Dalam konteks Kenya, Covid-19 pertama yang dikonfirmasi jatuh pada bulan Maret 2020 dan langkah-langkah penanggulangan berikutnya memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada hasil ekonomi dan sosial negara tersebut dengan beban yang seringkali tidak proporsional pada perempuan dan juga anak perempuan.

¹⁶ Liliansa Elisabeth. Menguak Topeng Patriarki: Tantangan Kesetaraan Gender di Kenya 2024. Diakses dari <https://retizen.republika.co.id/posts/484541/menguak-topeng-patriarki-tantangankesetaraan-gender-di-kenya>

Di Kenya, 77.372 kasus terkonfirmasi, 51.507 pemulihan, dan 1.380 kematian dilaporkan hingga 23 November 2020.¹⁷ Pemerintah Kenya sejatinya memiliki kewajiban untuk mencegah, menangani, dan memperbaiki kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan setiap saat, termasuk selama krisis dan dalam situasi kemanusiaan. Menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperbaiki kegagalan ini dan membangun kerangka kerja berbasis hak yang kuat untuk mengantisipasi keadaan darurat terkait kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender di masa mendatang Tingkat kekerasan yang terbilang tinggi terhadap perempuan dan anak perempuan di Kenya merupakan permasalahan serius yang terus berlanjut dan semakin meningkat selama pandemi Covid-19. Selama satu setengah dekade terakhir, pemerintah Kenya telah memberlakukan berbagai upaya penegakan hukum diantaranya:

1. Undang-Undang Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di tahun 2015.
2. Undang-Undang Mutilasi Alat Kelamin Perempuan di tahun 2011.
3. Undang-Undang Pelanggaran Seksual di tahun 2006.

Pemerintah juga turut menetapkan pedoman tentang bagaimana kasus kekerasan berbasis gender harus ditangani dan korban harus didukung oleh polisi, staff medis khusus dan juga diikuti pejabat pengadilan. Sebelumnya, Kenya telah meratifikasi protokol piagam afrika tentang hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat tentang hak-hak perempuan di Afrika (Protokol Maputo) dan juga beberapa perjanjian internasional lainnya salah satunya adalah CEDAW. Dimana Kenya ditugaskan bahkan diwajibkan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender Namun, ketika komitmen untuk menanggulangi KDRT ini diuji oleh pandemi Covid-19 yang merajalela, respons pemerintah justru tidak memadai. Pemerintah tidak bertindak efektif untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual dan KDRT selama tahap awal pandemi, lembaga Kenya tidak efektif dalam menerapkan perlindungan untuk melindungi dan mendukung korban dan

¹⁷ Ministry of Health–MoH. Ministry of Health press releases: Press statements on COVID-19 2020. Diakses dari <https://www.health.go.ke/press-releases/>

pemerintah juga tidak melakukan upaya yang maksimal dalam menyediakan layanan termasuk perawatan kesehatan dan dukungan psikolonial, rumah aman dan tempat penampungan, serta bantuan hukum dan keuangan.¹⁸

Femisida mewakili manifestasi paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan. Pembunuhan semacam itu sangat sering bukanlah insiden terisolasi tetapi lebih merupakan puncak dari bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang sudah ada sebelumnya yang mempengaruhi semua wilayah dan negara di seluruh dunia. Secara luas lagi, femisida atau pembunuhan terkait gender terhadap perempuan dan anak perempuan.¹⁹ Tahun 2024 telah dirusak oleh semakin meningkatnya serangan terhadap perempuan, dengan kasus kekerasan berbasis gender hingga spektrum tertinggi yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang mencapai tingkat mengkhawatirkan. Dibuktikan melalui periode awal bulan Januari 2024, setidaknya terdapat 14 jumlah wanita terbunuh, yang menjadi awal tahun yang penuh dengan bencana. Lonjakan ini terjadi berdasarkan tren suram dari tahun sebelumnya, karena dilansir dari Africa Data Hub yang mengungkapkan terdapat lebih dari 500 wanita dibunuh oleh pasangan intim mereka Desember 2023. Selain itu juga data menunjukkan bahwa antara 39% dan 47% wanita di Kenya pernah mengalami kekerasan berbasis gender dalam hidup mereka.²⁰

Nairobi sebagai daerah yang memimpin kasus pembunuhan terhadap perempuan, yang dimana rumah secara tradisional seharusnya menjadi tempat yang aman untuk berlindung, kini berubah menjadi tempat yang suram dan tidak aman lagi bagi perempuan. Sekitar 80% pembunuhan terjadi di dalam rumah. Dalam konteks ini, rumah mengacu pada ruang bersama antara korban dan pelaku, yang tersangka sering mengunjungi tempat tinggal tersebut. Analisis yang dilakukan oleh Africa Data Hub turut

¹⁸ "I Had Nowhere to Go", 2021. Violence Against Women and Girls During the Covid-19 Pandemic in Kenya. Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2021/09/21/i-had-nowhere-go/violence-againstwomen-and-girls-during-covid-19-pandemic-kenya>

¹⁹ The terms "femicide" and "gender-related killings of women and girls" are used interchangeably in this research brief

²⁰ The Standard, 2024: A year marked by femicide in Kenya. Diakses dari <https://www.standardmedia.co.ke/national/article/2001508645/2024-a-year-marked-by-femicidein-kenya>

menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap perempuan seringkali didahului oleh kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali perempuan yang dibunuh mengalami penyiksaan sistematis oleh suami sebagai pasangan mereka.²¹

Kenya mencerminkan budaya impunitas, diskriminasi struktural, serta lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan yang masih sangat terlihat, femisida merupakan puncak tertinggi dalam spektrum kekerasan terhadap perempuan, yang berawal dari pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, hingga berakhir pada spektrum terparah yaitu pembunuhan. Tinggi persentase angka pembunuhan yang terjadi di Kenya diperparah oleh norma patriarki yang masih mengakar, hingga keterbatasan akses perempuan terhadap keadilan.

Sejatinya kekerasan berbasis gender, dalam bentuk fisiknya, memberikan banyak sekali faktor yang negatif untuk perempuan terutama pada konsekuensi kesehatan yang berkepanjangan. Permasalahan rumit ini berakar pada berbagai faktor termasuk biologis, sosial, budaya, ekonomi dan juga politik, hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan mental secara mendalam. KNBS atau Survei Biro Statistik Nasional Kenya tahun 2022, 34% perempuan Kenya telah banyak mengalami kekerasan fisik sejak usia muda yaitu usia 15 tahun, dengan sekitar 16% telah mengalaminya pada tahun 2021. Di tengah pandemi Covid-19, pada tahun 2020 laporan dari UN Women dan juga KNBS memberikan seruannya terkait terdapat 23% perempuan perkotaan dan 21% perempuan pedesaan mengalami kekerasan fisik di dalam rumah mereka, yang sering dilakukan oleh keluarga atau juga teman.

Untuk setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilaporkan, terdapat beberapa kisah yang sebetulnya tersembunyi dari belenggu ketakutan karena narasi yang tidak terungkap yang tidak hanya terjadi di dalam rumah, melainkan juga bergema di ruang sosial dan juga tempat kerja. Dampak kesehatan pada perempuan yang mengalami kekerasan fisik sangat luas, banyak pula yang menderita depresi,

²¹ Silencing Women Trafficking Femicide Cases Reported in Kenyan Newspapers from 2016 to date. Diakses dari <https://www.africadatahub.org/femicide-keny>

kecemasan, dan juga pikiran untuk bunuh diri. Masyarakat harus memberikan dukungan emosional dan bekerja sama untuk memberdayakan penyintas agar bebas dari kebungkaman. Penanganan kasus kekerasan berbasis gender termasuk juga KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup intervensi hukum, sosial, Kesehatan termasuk juga organisasi internasional yaitu UN Women dalam mendukung para penyintas untuk meningkatkan kesadaran, dan juga mencegah kejadian lebih lanjut.²²

2). Peran UN Women Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kenya.

Kehadiran UN Women ini dipercaya sebagai salah satu bentuk agenda reformasi PBB, dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan akan masalah gender yang sering terjadi di berbagai belahan dunia. Melalui UN Women, negara bisa memiliki standar internasional dalam memperoleh hak kesetaraan gender untuk perempuan di dunia. UN Women juga turut bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu perempuan atau isu yang berbasis gender. Kerja sama ini tentunya sangat dibutuhkan karena akan membantu lembaga pemerintahan merancang dan mengolah kebijakan, norma, standar kesetaraan gender, supaya bisa terealisasi dengan baik di setiap lembaga pemerintahan negara. Dengan hal ini maka UN Women akan siap sedia membantu setiap negara untuk menyukseskan hak kesetaraan gender serta memberdayakan perempuan di seluruh dunia.²³

Sesuai dengan Capacity Building yang disampaikan oleh Pease, bahwa sebuah proses yang melibatkan penguatan kemampuan individu dan juga kelompok untuk mengakses sumber daya, mengambil keputusan, dan memanfaatkan peluang dalam aspek perubahan sosial yang berkelanjutan.

²² Amref Health Africa. Silent Scars : Mengungkap Dampak Kekerasan Berbasis Gender terhadap Kesehatan Perempuan di Kenya 2024. Diakses dari https://newsroom-amreforg.translate.google/blog/2024/03/silent-scars-unveiling-the-toll-of-gender-based-violence-on-womens-health-in-kenya/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

²³ Mengenal UN Women dan 3 Peran Utamanya, 2022. Diakses dari <https://un.kompas.com/read/2022/03/24/160000669/mengenal-un-women-dan-3-peranutamanya?page=all>

dalam konteks ini Capacity Building bukan lagi persoalan meningkatkan keterampilan praktis, tetapi juga membangun kapasitas untuk mampu berperan aktif dalam pembangunan, mengubah norma sosial dan memperjuangkan kesetaraan. Melalui “Making Every Woman and Girl Count in Kenya 2020” kebijakan ini akan berfokus pada pentingnya pengumpulan data yang lebih baik dan representatif perempuan dan anak perempuan di Kenya.

Tentunya kebijakan ini merancang program dan kebijakan yang lebih gender responsive terhadap kebutuhan perempuan dan anak perempuan untuk memperkuat pada posisi dalam pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2020 UN Women bermitra dengan pemerintah Kenya, UNFPA, OXFAM, dan Care, melakukan survey pada bulan Agustus – September 2020 untuk memahami dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap kekerasan perempuan melalui Making Every Woman And Girl Count In Kenya.²⁴

Pease menyatakan bahwa suatu pendekatan yang mengandalkan kerja sama kolektif untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai oleh individu atau satu kelompok saja. Pease menekankan bahwa Collective Act Mechanism sebagai alat yang penting dalam memfasilitasi kerja sama antarsektor untuk mencapai tujuan yang lebih besar, termasuk dalam konteks kesetaraan gender. Melalui forum generasi atau Generation Equality Forum 2021, forum ini mengedepankan kerja sama multilateral dengan komitmen bersama dalam mempercepat perubahan untuk mencapai kesetaraan gender secara global.

Generation Equality Forum merupakan sebuah platform internasional yang berupaya untuk mempercepat penerapan komitmen kesetaraan gender dalam deklarasi dan platform aksi Beijing untuk mencapai perubahan transformatif. Platform ini diselenggarakan oleh UN Women dan diselenggarakan bersama oleh pemerintah Meksiko dan Prancis. Sebagai bagian dari proses forum tersebut, dalam hal ini Kenya menjadi salah satu

²⁴ Making Every Woman And Girl Count In Kenya
https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/AR2020Annex/MEWGC_Annual_Report_2020_Brief_Country_Report_Kenya.pdf

pemimpin koalisi aksi kekerasan berbasis gender, salah satu dari enam koalisi aksi. Generation Equality Forum ini diluncurkan pada tahun 2021 di Paris. Kenya menjadi salah satu pemimpin Generation Equality Forum GBV Action Coalition, dimana negara tersebut membuat 12 komitmen pada tahun 2026. Dan komitmen ini berlandaskan pada pilar utama yaitu pendanaan, kepemimpinan dan akuntabilitas, hukum dan kebijakan, data dan penyediaan layanan.

Platform aksi Kenya dalam Generation Equality Forum. Presiden Kenya resmi mengumumkan serangkaian komitemnya untuk mempercepat upaya nasional untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan mutilasi alat kelamin perempuan dalam laporan kebijakan baru. Sebagai salah satu pemimpin global koalisi Generation Equality Forum. Uhuru Kenyatta sebagai Presiden Kenya mengungkap rencana negaranya untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender pada tahun 2026. Pada acara yang diselenggarakan bersama oleh UN Women dan juga pemerintah Kenya, serangkaian komitmen telah dirumuskan menjadi berbagai ringkasan kebijakan.²⁵

Let It No Happen Again merupakan seruan untuk memerangi kekerasan dan ketidakadilan yang sejalan dengan bantuan internasional yang memiliki fokus utama dalam pemberdayaan dan pencegahan. Aid Provider menurut Pease memiliki seruan pandangan yang sama bahwa untuk memastikan bantuan yang mereka berikan bukan hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif. Hal ini memastikan bahwa adanya intervensi bantuan internasional yang lebih berkelanjutan dan transformal dapat mencegah adanya kasus kekerasan berbasis gender. Duta Besar Italia untuk Kenya, Alberto Pieri, dan juga Direktur Regional UN Women untuk Afrika Timur dan Selatan, Maxime Houinato, menandatangani perjanjian untuk secara resmi memulai fase ketiga melalui proyek Let It No Happen Again: Enhancing Prevention and Response to Violence Against Women in Elections, 12 April 2022 Nairobi. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Giovanni Grandi, Kepala Kantor

²⁵ Generation Equality Forum (GEF). Diakses dari <https://gender.go.ke/programs/generationequality-forum-gef>

Badan Kerja Sama Pembangunan Italia di Nairobi, ibu Anna Mutavati, Perwakilan Negara UN Women untuk Kenya, Perwakilan dari Kementerian Layanan Publik, gender, urusan warga lanjut usia dan juga program khusus, perwakilan dari kantor komisaris tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), dari kepolisian nasional, dan juga masyarakat sipil

Saat Kenya siap menghadapi pemilu di tahun 2022, proyek ini akan difokuskan pada kerja sama dengan para pemangku kepentingan utama dari berbagai sektor, guna untuk mencegah dan juga menanggapi kasus apa pun secara komprehensif. Christine Okeno, analis UN Women Kenya (EVAW) Ending Violence Against Women, menjelaskan, bahwa, bagi kami, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan anak perempuan dalam proses pencegahan penting guna memastikan akses ke layanan multisektoral yang berkualitas yang penting bagi keselamatan, perlindungan, dan juga pemulihan mereka dari kekerasan. Untuk mencegahnya, kami membutuhkan semua pemangku kepentingan untuk siap dan siaga serta memadai.²⁶

Pease berpandangan bahwa organisasi internasional sejatinya berperan sebagai pemecah masalah dengan cara membantu negaranegara mengatasi permasalahan melalui kerja sama yang kolektif dan sesuai dengan norma serta nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini kunjungan Direktur Eksekutif UN Women ke Kenya mencerminkan dan sesuai dengan prinsip organisasi internasional sebagai problem solving atau pemecah masalah dengan memobilisasi dukungan dan pengembangan solusi yang kolaboratif. Sima Bahos sebagai Direktur Eksekutif UN Women melaksanakan misi dua hari di Kenya, dimana ia melihat langsung pekerjaan UN Women, dan bertemu dengan kelompok masyarakat sipil dan mitra, untuk memperkuat kemitraan, mengorbankan wacana publik menuju generasi kesetaraan dan menggerakkan tindakan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di negara tersebut.

²⁶ Kenya – Italy and UN Women renew their commitment to fight gender-based violence in Kenya. Diakses dari <https://onuitalia.com/2022/04/13/kenya-italy-and-un-women-renew-commitment-tofight-gender-based-violence/>

Misi tersebut berlangsung saat direktur eksekutif bergabung dengan pejabat PBB lainnya untuk menghadiri pertemuan Dewan Eksekutif PBB, yang diadakan pada tanggal 3-4 Mei di Nairobi, Kenya. Keterlibatan Direktur Eksekutif di Kenya menggaris bawahi kemajuan negara tersebut menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sekaligus memberikan kesempatan untuk berbagi rekomendasi guna lebih memperkuat upaya Kenya dalam melindungi hak-hak perempuan

Puncak dari misi tersebut adalah kunjungan ke Maisha Girls Safe House, yang menyediakan keamanan dan dukungan holistic dan ahli bagi anak perempuan yang menjadi kekerasan, membantu membuat akses terhadap keadilan menjadi lebih inklusif dan lebih efektif. Di sana, ibu Bahous menghabiskan waktu bersama para korban muda dan mendengarkan masukan mereka tentang tantangan yang mereka hadapi. Selain tantangan yang mereka hadapi, para penghuni juga membagikan kisah sukses mereka. UN Women Kenya mendukung para mitra dalam menyediakan layanan penting, termasuk tempat penampungan, bagi para penyintas GBV. UN Women juga mendukung pemerintah melalui kementerian gender untuk mengembangkan pedoman dan prosedur operasional standar yang relevan untuk tempat-tempat penampungan dan rumah aman, serta melakukan penilaian kebutuhan tempat penampungan untuk memberikan dukungan dan advokasi khusus kepada pemerintah daerah. Dalam pertemuan dengan organisasi hak-hak perempuan.²⁷

Dalam sebuah laporan tertulis yang dilakukan oleh UN Women, 27 Januari, ribuan perempuan dan laki-laki berunjuk rasa di Nairobi dan kota-kota besar lainnya di Kenya untuk menyerukan diakhirinya pembunuhan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan. Para pengunjuk rasa membawa plakat dengan pesan seperti “Kami adalah manusia”, “Sebutkan nama mereka”, dan “Hentikan pembunuhan kami”. Realitas yang sangat mengejutkan bahwa sedikitnya 10 perempuan terbunuh pada bulan

²⁷ UN Women Executive Director visits Kenya, galvanizes action for Generation Equality. Diakses dari <https://www.unwomen.org/en/news-stories/news/2023/05/un-women-executive-directorvisits-kenya-galvanizes-action-for-generation-equality>

pertama di tahun 2024. Proses aksi tersebut menegaskan bahwa pentingnya mendukung dan mempercayai korban saat mereka berbicara, sehingga kekerasan lebih lanjut dapat dicegah jauh sebelum meningkat menjadi pembunuhan.

Dalam hal ini UN Women memimpin beberapa inisiatif yang bertujuan untuk mencegah femisida dan kekerasan berbasis gender di Kenya, dengan memberikan pelatihan khusus bagi personel polisi. Dalam program semacam itu, petugas dilatih untuk mengenali tandatanda potensi femisida dan tantangan unik yang dihadapi oleh perempuan, sekaligus mempromosikan pendekatan yang berpusat pada korban dalam penegakan hukum. UN Women telah melatih lebih dari 600 petugas di seluruh kepolisian nasional Kenya termasuk juga otoritas transportasi dan keselamatan nasional, serta anggota sektor transportasi informal.

Menanggapi permasalahan ini, tentunya UN Women berperan sebagai pemecah masalah dengan menuangkan berbagai implementasi inisiatif yang startegis. Melalui peningkatan keterlibatan laki-laki dalam forum dialog nasional pemuda laki-laki dalam mencegah femisida, melalui kampanye kesadaran publik selama 16 hari aktivisme melawan kekerasan berbasis gender yang dimulai pada 25 November 2024 untuk mengakhiri impunitas dan berinvestasi pada eliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. UN Women mendukung para penyintas kekerasan berbasis gender dengan bekerja sama dengan kelompok lokal yang menawarkan konseling, bantuan hukum, dan akses ke tempat penampungan yang aman.

Melalui kemitraan dengan lima organisasi masyarakat sipil di Kenya, UN Women telah memfasilitasi dukungan psikososial kepada sekitar 40.000 penyintas, dan memberikan bantuan hukum kepada sekitar 1.000 orang. Pemerintah Kenya telah berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender pada tahun 2026 sebagai bagian dari kepemimpinan bersama global koalisi aksi generasi kesetaraan, Kenya memiliki kerangka hukum yang kuat seputar kekerasan berbasis gender, dengan berbagai macam undang-undang

yang jika ditegakkan secara efektif maka secara signifikan mengurangi kekerasan berbasis gender.²⁸

Pendekatan yang dilakukan UN Women ini tentunya sejalan dengan konsep peran organisasi internasional sebagai Problem Solving menurut Pease, dimana organisasi internasional berfungsi sebagai platform untuk kerja sama dan koordinasi dalam mengatasi isu global. Dengan mengidentifikasi suatu masalah, mengembangkan Solusi kolaboratif dan mengimplementasikan tindakan yang efektif, UN Women berperan penting dalam upaya mengakhiri femisida di Kenya

KESIMPULAN

Melalui berbagai program yang disediakan oleh UN Women seperti Making Every Woman and Girl Count pada tahun 2020, UN Women memperkuat kapasitas nasional Kenya dalam pengumpulan data berbasis gender yang menjadi dasar penting untuk perumusan kebijakan yang lebih responsif. Di tahun 2021 melalui Generation Equality Forum UN Women memanfaatkan pendekatan Collective Act Mechanism untuk memobilisasi berbagai aktor lintas sektor dalam mendukung kesetaraan gender. Kemudian di tahun 2022, program Let It No Happen Again menggambarkan peran UN Women sebagai Aid Provider dengan fokus memberikan bantuan kepada korban kekerasan berbasis gender. Kemudian, tahun 2023 kunjungan Direktur Eksekutif UN Women yaitu ibu Sima Bahous ke Kenya menunjukan peran Problem Solving, yang menyoroti kebutuhan untuk solusi langsung terhadap kasus kekerasan berbasis gender, khususnya femisida. Isu ini menjadi lebih mendesak pada 2024 ketika UN Women Kenya menyerukan tindakan yang tegas terhadap femisida sebagai bagian dari komitmennya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Pendekatan UN Women dengan basis teori liberalisme institusional digunakan oleh peneliti untuk menunjukkan bahwa kerja sama internasional

²⁸ UN Women. Femicide cases in Kenya fuel urgent calls for action to end violence against women 2024. Diakses dari <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2024/02/femicidecases-in-kenya-fuel-urgent-calls-for-action-to-end-violence-against-women>

melalui institusi seperti UN Women mampu menghasilkan solusi efektif dalam mengatasi tantangan global, termasuk kekerasan berbasis gender. Dengan menggunakan konsep gender, penelitian ini juga menegaskan pentingnya memahami akar penyebab dari kekerasan berbasis gender yang terkait dengan ketimpangan sosial, ketidaksetaraan struktural dan budaya patriarki yang sangat kental dan hal itu masih ada dan terjadi di Kenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkiya, Balqis Tsabita. Mengenal UN Women dan 3 Peran Utamanya. 24 Maret 2022. kompas.com. 20 Januari 2025.
- Cooperation, Italian Agency For Development. Kenya – Italy and UN WOMEN renew their commitment to fight gender-based violence in Kenya. 12 April 2022. nairobi.aics.gov.it. 1 Februari 2025.
- Deane, Tameshnie. "Gender-Based Violence in International Human Rights Law –The Efficacy of the United Nations Human Rights Legal Framework and CEDAW in Addressing the Issue." *The Age of Human Rights Journal*(2024): 23. revistaselectronicas.ujaen.es.
- Elisabeth, Liliana. *Menguak Topeng Patriaki: Tantangan Kesetaraan Gender di Kenya*. 10 Oktober 2024. retizen.republika.co.id. 30 Januari 2025.
- Foundation, Bill & Melinda Gates. *Silencing Women Tracking and Humanizing Femicide Cases in Kenya*. 22 Januari 2024. africadatahub.org. 30 Januari 2025.
- Gichana, Agatha. *16 dead in one month: Women across Kenya hold march against femicide*. 27 Januari 2024. nation.africa. 10 November 2024.
- Health, Ministry of. *Press statements on COVID-19*. . 2020. health.go.ke/press-releases/. 29 Januari 2025.
- Human Rights Watch. *I Had Nowhere to Go Violence Against Women and Girls .Report During the Covid-19 Pandemic in Kenya*. United States of America:hrw.org, 21 September 2021. hrw.org.
- Human Rights Watch. *Kenya: Survivors of Gender-Based Violence Lack Help*. 21 September 2021. hrw.org. 10 November 2024.
- Kemunto, Joy. "Kenya's Femicide and Gender Based Violence Crisis: A Case Study for an International Response to the Femicide Epidemic." *Fordham International Law Journal* (2024). fordhamilj.org.
- Kenya, Bizna. *World Vision Kenya's Statement On Gender-Based Violence (GBV)*. 27 November 2024. biznakenya.com. 10 November 2024.

- Lawal, Shola. *Femicide in Kenya: What's causing an epidemic of violence against women?* 27 Januari 2024. [aljazeera.com](https://www.aljazeera.com). 10 November 2024.
- Mukii, Rose Betty. *Silent Scars: Mengungkap Dampak Kekerasan Berbasis Gender terhadap Kesehatan Perempuan di Kenya*. 15 Maret 2024. newsroom-amref.org. 3 Februari 2025.
- OCHA, UN. *Kenya Situation Report*. 10 September 2020. [unocha.org](https://www.unocha.org). 10 November 2024.
- Pateman, Carole. *The Sexual Contract, Contracting In*. United Kingdom: Polity Press in association with Blackwell Publishers, 1988. e-book.
- Russell, Diana E. H and Roberta A Harmes. "Femicide in global perspective." Russell, Diana E. H and Roberta A Harmes. *Femicide in global perspective*. New York: Teachers College Press, 2001. archive.org.
- Russell, Diana E. H. "My Years Campaigning for the Term "Femicide"." *Dignity :A Journal of Analysis of Exploitation and Violence* (2021): 6. digitalcommons.uri.edu.
- Sørensen, Robert Jackson & Georg. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. United Kingdom: Oxford University Press, 2013. e-book.
- Tchoukou, Julie Ada. "The Silences of International Human Rights Law: The Need for a UN Treaty on Violence Against Women." *Human Rights Law Review* (2023). academic.oup.com.
- UNODC, UN Women. "Gender Related Killings of Women and Girls (Femicide/Feminicide)." prepared by the Research and Trend Analysis Branch. 2023. [unodc.org](https://www.unodc.org).
- UNODC, UN Women. "Gender-related killings of women." Improving data to improve responses. 2021. [unodc.org](https://www.unodc.org).
- UN Women. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women." 18 Desember 1979. *United Nations*. [ohchr.org](https://www.ohchr.org). 10 November 2024.
- UN Women. *Ending Violence Against Women And Girls. How We Make a Difference*. In Brief. New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women , 2013. [unwomen.org](https://www.unwomen.org).
- UN Women. Executive Director visits Kenya, galvanizes action for Generation Equality. 5 Mei 2023. [unwomen.org](https://www.unwomen.org). 1 Februari 2025.

UN Women. *Femicide cases in Kenya fuel urgent calls for action to end violence against women*. 9 Februari 2024. unwomen.org. 15 November 2024.

UN Women. Generation Equality Forum : Kenya's Roadmap for Advancing Gender Equality and Ending All Forms of Gender Based Violence and Female Genital Mutilation by 2026. Advancing Gender Equality. Republic of Kenya: UN Women, 2022. [gender.go](https://gender.go.ke).

UN Women. Making EVery Woman and Girls Count in Kenya. In Brief Final Annual Report. Kenya: Women Count Data Hub, 2020. data.unwomen.org.

Wanga, Sharon. *2024 : A year marked by femicide in Kenya*. Januari 2025. standardmedia.co.